

Potensi Sektor Unggulan Serta Kontribusinya Dalam Menciptakan Kesempatan Kerja di Kabupaten Lombok Barat

Hailuddin^{*1}, Akung Daeng², Mahyuddin Nasir³, Alamsyah AB⁴, Irwan Suriadi⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Correspondence Email: didin@unram.ac.id

Info Artikel

Kata Kunci:
Sektor unggulan/
basis, Tipologi Klassen,
Location Quotient, Rasio
Pertumbuhan.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai potensi ekonomi yang menjadi dominasi serta memiliki keunggulan terutama dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Lombok Barat. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder time series. Selanjutnya data dianalisis dengan memakai Tipologi Klassen, Location Quotient (LQ); Model Rasio Pertumbuhan (MRP); dan analisis kesempatan kerja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan analisis Location Quotient (LQ), Kabupaten Lombok Barat memiliki 12 sektor yang masuk kategori sektor basis (unggulan). Sedangkan berdasar analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP), terdapat 6 sektor ekonomi yang menonjol dengan ratio pertumbuhan (RPs) yang positif dan lebih besar dari 1. Dengan dasar 2 analisis tersebut dan mengacu pada kajian tipologi Klassen, Lombok Barat termasuk dalam klasifikasi Tipe II yaitu 'daerah tertinggal dan dalam proses membangun'. Ini terjadi karena sektor-sektor pendukung pertumbuhannya masih didominasi oleh sektor sekunder yang mulai mengarah ke sektor tersier, seperti sektor penyediaan akomodasi makan minum, Industri pengolahan, Pengadaan air & pengelolaan sampah, Konstruksi, Jasa pendidikan dan jasa lainnya, Perdagangan besar dan eceran, serta sektor Transportasi dan pergudangan. Selanjutnya dari aspek kesempatan kerja didominasi oleh 5 sektor ekonomi utama yaitu sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan; Industri pengolahan; Perdagangan besar dan eceran; Transportasi dan pergudangan serta Jasa keuangan dan asuransi perusahaan, dan sosial. Sedangkan sektor lain relative masih kecil kontribusinya. Karenanya eksistensi sektor-sektor potensial yang ada harus tetap dijaga, dengan melakukan pemetaan potensi yang dimiliki yang diekspose secara luas. Promosi dan inovasi periodik terhadap hasil produksi/industri dan jasa di tingkat lokal/nasional maupun internasional, mesti terus digalakkan dan dikembangkan.

1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya pembangunan ekonomi merupakan usaha untuk meningkatkan dan mempertahankan kenaikan pendapatan perkapita dengan memperhatikan pertumbuhan penduduk serta memperbaiki struktur ekonomi untuk mencapai

kesejahteraan masyarakat. Semua hal tersebut tentu akan dapat berjalan, apabila sumber daya (alam dan manusia), tingkat teknologi, keadaan pasar serta sifat dari output itu sendiri dapat dialokasikan dengan optimal. Berbagai upaya dilakukan suatu negara demi memenuhi harapan tersebut untuk

mengembangkan kegiatan ekonominya, seperti perbaikan aspek kelembagaan, perubahan struktur ekonomi, paket kebijakan dan dukungan permodalan agar kesejahteraan masyarakat terwujud. Semua itu dituangkan dalam kebijakan-kebijakan pembangunan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan peningkatan kegiatan ekonomi yang didasarkan pada kekhasan wilayah yang bersangkutan dengan memperhatikan potensi-potensi yang ada.

Selaras dengan hal di atas, pembangunan daerah juga tentu penekanannya pada kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik lokal. Orientasi ini mengarahkan pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi masyarakatnya

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu daerah antara lain ketersediaan modal yang cukup sehingga kegiatan pembangunan akan dapat berjalan dengan lancar. Modal tersebut akan lebih bermakna jika diinvestasikan pada sektor-sektor yang memiliki potensi untuk menjadi sektor unggulan dan memiliki daya dorong bagi sektor lainnya sehingga dapat meningkatkan pembangunan ekonomi dengan lebih cepat. Salah satu tolok ukur pembangunan ekonomi daerah adalah pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang merupakan semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik selama satu tahun, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut (Sukirno, 2013). Dengan memperhitungkan laju pertumbuhannya,

maka secara spasial dapat diketahui sektor dan potensi-potensi dominan yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Pertumbuhan PDRB yang dikuti oleh perubahan laju pertumbuhan ekonomi persektor, tentu akan mempengaruhi pembangunan ekonomi daerah (BPS NTB, 2021).

Keberhasilan pembangunan ekonomi dengan mengutamakan potensi dan kekhasan daerah akan berdampak pada pembangunan daerah, terutama pada daerah yang sedang berkembang. Perbaikan kualitas sumberdaya manusia, pembangunan infrastruktur dan sarana pendukung lainnya dengan tepat sasaran akan menjadi daya dorong dalam mendukung perkembangan suatu daerah. Hasil dari kegiatan tersebut tentu akan berdampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja. Efek selanjutnya adalah akan membantu mengurangi jumlah pengangguran serta perputaran roda perekonomian akan menjadi lebih baik. Hal ini berarti mencerminkan perekonomian masyarakat sudah makin membaik pula.

Hal lain yang mendorong perkembangan ekonomi daerah adalah adanya otonomi daerah. Penerapan otonomi daerah banyak berpengaruh terhadap kelembagaan yang ada, baik yang sudah lama maupun yang baru. Peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat menjadi salah satu alasan utama dari adanya perubahan dan pemekaran, disamping alasan-alasan lain seperti pemerataan pembangunan, peningkatan aksesibilitas, dan kemudahan operasional pembangunan (BPS NTB, 2021). Otonomi juga sangat memungkinkan akan meningkatkan investasi karena proses perijinan yang lebih mudah. Mekanisme perijinan yang demikian memberikan peluang bagi investor mempercepat realisasi investasinya, meminimalkan pengeluaran yang tidak terarah dan meminimalkan terjadinya konflik dengan lingkungan daerah

tujuan. Dengan mekanisme tersebut akan memperkuat posisi tawar kabupaten/kota dan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah setempat (Sudantoko, 2003).

Kabupaten Lombok Barat sebagai salah satu daerah otonom di Nusa Tenggara Barat, telah mengidentifikasi dan menganalisis masalah dan potensi yang ada di daerah. Kebijakan ini dianggap tepat untuk menjadikan daerah semakin baik dari tahun ke tahun. Pembangunan yang dilakukan tentu dengan memperhatikan semua aspek yang ada, seperti letak geografis, sumberdaya alam, sumberdaya manusia, maupun sosial budaya masyarakatnya, sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemda akan lebih tepat sasaran. Hal positif lain dengan otonomi ini adalah daerah akan memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi unggulan kekhasan daerah, sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah yang dapat memperluas lapangan kerja dan mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dengan gambaran diatas, maka Kabupaten Lombok Barat perlu mengarahkan pembangunan pada semua sektor/subsektor, dengan penekanan pada sektor prioritas seperti agribisnis, kelautan/perikanan, pariwisata dan jasa-jasa. Pariwisata merupakan andalan karena potensinya yang cukup besar di daerah ini, baik wisata pantai/gili, pegunungan/lembah, alam/hutan serta wisata budayanya. Pengembangan agribisnis ditujukan untuk memanfaatkan peluang pasar potensial, antara lain jagung, tembakau, sayur/buah, perikanan dan peternakan. Demikian juga untuk sektor jasa yang akan sangat mendukung sektor pariwisata dan sektor-sektor lainnya. Semua itu muaranya tentu akan makin terbukanya kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat. Dengan dasar tersebut menjadi sangat strategis untuk mengkaji sektor/subsektor ekonomi yang menjadi potensi unggulan di Kabupaten Lombok Barat

yang memiliki prospek baik kedepan, serta sejauh manakah kontribusi sektor unggulan tersebut dalam menciptakan kesempatan kerja bagi perekonomian daerah.

2. TINJAUAN PUSTAKA Pertumbuhan Ekonomi

Banyak teori yang menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi. Mazhab *Historians* misalnya, menggambarkan perkembangan ekonomi merupakan sebuah fenomena yang unik dan tidak berlaku secara universal. Oleh karena itu, anggapan tentang adanya hukum alam di bidang ekonomi sulit diterima. Friedrich List, tokoh utama paham ini menyatakan bahwa sistem liberalisme yang *laissez-faire* tidak dapat menjamin alokasi sumberdaya secara optimal (Arsyad, 2010). Dalam praktiknya, perkembangan ekonomi tergantung pada peran pemerintah, dunia bisnis dan lingkungan budaya. Kasus di beberapa negara, terdapat dua sektor utama yang sangat menentukan perekonomian nasionalnya yaitu sektor pertanian dan industri. Sektor pertanian diperlukan sebagai pemasok bahan pangan bagi masyarakat, tetapi tidak bisa diandalkan dalam memacu pertumbuhan ekonomi, sehingga suatu negara tidak akan pernah mencapai kemajuan apabila negara tersebut hanya bertumpu pada kekuatan pertanian saja. Oleh karena itu, industrialisasi merupakan langkah awal untuk membawa perekonomian kearah yang lebih maju. Perubahan struktural ini melibatkan seluruh fungsi ekonomi termasuk transformasi produksi dan perubahan dalam komposisi permintaan konsumen, perdagangan internasional dan sumberdaya serta perubahan faktor-faktor sosio-ekonomi seperti urbanisasi, pertumbuhan dan distribusi penduduk (Todaro, 2010).

Disisi lain Robert Malthus menitikberatkan perhatiannya pada perkembangan kesejahteraan suatu negara, yaitu pembangunan ekonomi yang dapat

dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kesejahteraan hanya apabila pertumbuhan tersebut akan meningkatkan *effective demand*. Peningkatan permintaan efektif tersebut pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan. Produksi dan distribusi sebagai dua unsur utama kesejahteraan dapat dicapai dalam jangka pendek, asal dikombinasikan pada proporsi yang besar. Faktor-faktor yang menentukan pembangunan ekonomi adalah tergantung pada tenaga kerja, modal, dan organisasi (Suryana, 2000).

Kajian dari aspek yang berbeda diungkapkan *Teori Pertumbuhan Endogen*. Teori ini mencoba untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan ekonomi yang berasal dari dalam (*endogenous*) sistem ekonomi itu sendiri. Kemajuan teknologi dianggap hal yang bersifat endogen, dimana pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari keputusan para pelaku ekonomi dalam berinvestasi di bidang ilmu pengetahuan. Selain itu pengertian modal di sini bersifat lebih luas, bukan hanya sekedar modal fisik tetapi juga mencakup modal insani (Arsyad, 2011). Selanjutnya dijelaskan faktor utama penyebab terjadinya perbedaan tingkat pendapatan perkapita antar negara adalah karena adanya perbedaan mekanisme alih pengetahuan, kapasitas investasi modal fisik, modal insani, dan infrastruktur. Karenanya teori ini menggunakan asumsi *increasing returns to capital investment* pada fungsi produksi aggregatnya.

Model ini menganggap ilmu pengetahuan sebagai salah satu bentuk modal, dan merupakan input terpenting dalam proses produksi. Hanya berkat ilmu pengetahuan orang dapat menciptakan metode baru dalam memproduksi sehingga diperoleh keuntungan-keuntungan ekonomis tertentu. Oleh karena itu, kurang realistis jika kita mengasumsikan

ilmu pengetahuan memiliki muatan pengembalian yang semakin menurun. Oleh karena itu teori pertumbuhan endogen mempunyai tiga elemen dasar yaitu: a). Adanya perubahan teknologi yang bersifat endogen melalui sebuah proses akumulasi ilmu pengetahuan, b). Adanya penciptaan ide-ide baru oleh perusahaan sebagai akibat dari mekanisme luberan pengetahuan, c). Produksi barang-barang konsumsi yang dihasilkan oleh faktor produksi ilmu pengetahuan akan tumbuh tanpa batas.

Basis Ekonomi

Pada prinsipnya teori ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk kemudian diekspor, sehingga akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja baru (Arsyad, 2010). Hal senada diungkapkan Glasson (dalam Irawan MS, 2012), bahwa kegiatan basis merupakan kegiatan mengeksport barang-barang dan jasa keluar batas perekonomian masyarakatnya atau memasarkan barang dan jasa mereka kepada orang yang datang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan.

Tarigan (2014) juga mengungkapkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari daerah sumber. Karena itu ekonomi basis didasarkan pada asumsi bahwa lokal ekonomi dapat dibagi menjadi dua sektor besar yaitu:

a. Sektor basis (non-lokal sektor), yaitu sektor atau kegiatan ekonomi yang melayani baik pasar domestik maupun pasar luar daerah itu sendiri yang berarti daerah secara tidak langsung mempunyai kekuatan memenuhi kebutuhan dalam

daerah serta mampu mengekspor barang maupun jasa keluar daerah itu sendiri.

- b. Sektor non basis (lokal sektor), yaitu sektor atau kegiatan yang hanya mampu melayani pasar dalam daerah tersebut.

Analisis basis dan non basis pada umumnya didasarkan atas nilai tambah atau lapangan kerja. Karena itu analisis menggunakan variabel lapangan kerja, pendapatan atau ukuran lain, tetapi yang umum di pakai adalah lapangan kerja atau pendapatan. Secara logika penggunaan variabel pendapatan lebih mengena kepada sasaran. Peningkatan pendapatan di sektor basis akan mendorong kenaikan pendapatan di sektor non basis dalam bentuk korelasi yang lebih ketat dibandingkan dengan menggunakan variabel lapangan kerja (Tarigan, 2005).

Sektor Unggulan

Suatu komoditi memiliki keunggulan bagi suatu wilayah apabila komoditi itu lebih unggul secara relatif dibanding komoditi lain. Pengertian unggul dalam hal ini adalah dalam bentuk perbandingan dan bukan dalam bentuk nilai tambah riil. Apabila keunggulan itu dalam bentuk nilai tambah riil maka dinamakan *keunggulan absolut*. Komoditi yang memiliki keunggulan walaupun hanya dalam bentuk perbandingan, lebih menguntungkan untuk dikembangkan dibandingkan dengan komoditi lain yang sama- sama diproduksi oleh suatu wilayah (Tarigan, 2005).

Mc.Eacheen (2000) mengungkapkan keunggulan dari aspek lain yaitu *keunggulan komparatif*, dimana individu yang mempunyai *opportunity cost* lebih rendah untuk memproduksi suatu output tertentu harus berspesialisasi pada output tersebut. Hukum keunggulan komparatif menyatakan bahwa perusahaan, daerah, atau negara yang mempunyai *opportunity cost* atas produksi suatu barang harus berspesialisasi dalam

produksi barang tersebut. Faktor-faktor seperti iklim, keterampilan tenaga kerja, kapital, dan sumber daya alam yang tersedia, masing-masing daerah tertentu di dunia mempunyai keunggulan komparatifnya masing-masing.

Dengan dasar tersebut sektor unggulan merupakan sektor yang memiliki keunggulan komparatif (*Comparative advantage*) dan keunggulan kompetitif (*Competitive advantage*) dengan produk sektor sejenis dari daerah lain serta mampu memberikan nilai manfaat yang lebih besar (Marhamah, 2000). Syarat suatu sektor tertentu untuk menjadi sektor unggulan adalah:

- Sektor tersebut harus menghasilkan produk yang mempunyai permintaan yang cukup besar, sehingga pertumbuhan cepat akibat dari efek permintaan tersebut.
- Adanya perubahan teknologi yang teradopsi secara kreatif, maka fungsi produksibaru bergeser dengan pengembangan kapasitas yang lebih luas.
- Harus terjadi peningkatan investasi kembali dari hasil-hasil sektor yang menjadi prioritas tersebut, baik swasta maupun pemerintah.
- Sektor tersebut harus berkembang sehingga mampu memberi pengaruh terhadap sektor-sektor lainnya.

Sehubungan dengan itu, suatu daerah harus memiliki kemampuan untuk menganalisis potensi ekonominya. Hal ini terkait dengan penentuan sektor-sektor riil yang perlu dikembangkan agar perekonomian daerah tumbuh cepat dan di sisi lain mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat potensi sektor tertentu rendah dan menentukan apakah prioritas untuk menanggulangi kelemahan tersebut. Kemampuan pemerintah daerah untuk melihat sektor yang memiliki keunggulan, memiliki prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor lain untuk berkembang (Tarigan, 2005).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif yang meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang guna membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki, dianalisis, kemudian menyimpulkannya (Nazir, 2009).

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang perolehan dan penyajiannya dilakukan oleh pihak lain yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan institusi pengumpulnya, dalam bentuk laporan, booklet, file dan lainnya (Arikunto S, 2002). Sumbernya adalah instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) baik tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Lombok Barat, serta instansi lain disamping sumber data on-line. Teknik pengumpulannya melalui observasi dan dokumentasi, kemudian dicatat dan dianalisa.

Variable utama yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. PDRB dan PDRB perkapita Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Lombok Barat. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang timbul dari semua unit produksi yang ada disetiap daerah.
2. Laju pertumbuhan PDRB Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Barat. Laju pertumbuhan PDRB merupakan tingkat pertumbuhan PDRB setiap tahun masing-masing sektor di daerah.
3. Jumlah penduduk dan laju pertumbuhannya setiap tahun selama periode analisis.
4. Sektor-sektor unggulan Kabupaten Lombok Barat. Sektor unggulan merupakan sektor yang mampu

memberikan kontribusi lebih besar pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

5. Pola pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Barat yang merupakan perkembangan dinamis setiap sektor/subsektor ekonomi dari waktu ke waktu dalam kurun waktu tertentu.
6. Kesempatan kerja secara sektoral, merupakan tenaga kerja yang mampu diserap oleh setiap sektor ekonomi di Lombok Barat.

Selanjutnya analisis data menggunakan alat analisis antara lain:

Location Quotient (LQ)

Analisis ini digunakan untuk mengkaji sektor/subsektor dengan klasifikasi unggulan. Dalam hal ini akan mengukur konsentrasi dari suatu kegiatan dalam suatu daerah dengan cara membandingkan perannya dalam perekonomian daerah tersebut dengan peran kegiatan sejenis dalam perekonomian di atasnya (regional atau nasional), dengan formulasi (Azis, 1994) sebagai berikut:

di mana:

$$LQ_i^R = V_i^R / V^R$$

$$V_i / V$$

V^R = pendapatan dari sektor i di wilayah Kabupaten Lombok Barat.

V^R = pendapatan total di wilayah Kabupaten Lombok Barat.

V_i = pendapatan dari sektor i di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

V = pendapatan total di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kriteria pengukurannya sebagai berikut:

- a. $LQ = 1$, berarti produk domestik yang dimiliki daerah tersebut habis dikonsumsi sendiri.
- b. $LQ > 1$, berarti sektor yang ada di daerah tersebut merupakan sektor basis yang mampu mengekspor hasil/produknya ke daerah lain.
- c. $LQ < 1$, berarti sektor yang ada di daerah tersebut bukan merupakan sektor basis dan

cendrung untuk mengimpor dari daerah lain.

Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

Model ini digunakan untuk membandingkan pertumbuhan suatu kegiatan baik dalam skala yang lebih kecil maupun dalam skala yang lebih luas. Ada dua rasio pertumbuhan dalam analisis ini (Imelia, 2006), yaitu:

- Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RPs), yaitu wilayah Kabupaten Lombok Barat.
- Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi (RPr), yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dengan demikian formula menghitung MRP adalah;

$$\text{Rasio Pertumbuhan Wilayah Prov. NTB (RPr)} = \Delta E_{ir} / E_{ir}(t)$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Wilayah Kab.Lobar(RPs)} = \Delta E_r / E_r(t) \Delta E_{ij} / E_{ij}(t) \Delta E_{ir} / E_{ir}(t)$$

Dimana :

$\Delta E_{ir} = E_{ir}(t+1) - E_{ir}(t)$ adalah perubahan PDRB Provinsi NTB di sektor i.

$E_{ir}(t) =$ PDRB Provinsi NTB di sektor i awal periode.

$\Delta E_r = E_r(t+1) - E_r(t)$ perubahan PDRB Provinsi NTB.

$E_r(t) =$ PDRB Provinsi NTB pada awal periode.

$\Delta E_{ij} = E_{ij}(t+1) - E_{ij}(t)$ adalah perubahan PDRB Kabupaten Lombok Barat disektor i

$E_{ij}(t) =$ PDRB Kabupaten Lombok Barat di sektor i awal periode.

$\Delta E_j = E_j(t+1) - E_j(t)$ perubahan PDRB Kabupaten Lombok Barat.

$E_j(t) =$ PDRB Kabupaten Lombok Barat pada awal periode.

Kriteria yang dipakai sebagai tolok ukur kedua Ratio diatas (RPs) dan (RPr) adalah sebagai berikut:

- Bila nilai $RPr > 1$ dan positif (+), menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor tertentu dalam wilayah referensi lebih tinggi dari pertumbuhan total wilayah referensi.
- Bila nilai $RPr < 1$ dan negatif (-), menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor tertentu dalam wilayah referensi lebih kecil dari pertumbuhan total wilayah referensi.
- Bila nilai $RPs > 1$ dan positif (+), menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor tertentu ditingkat wilayah studi lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah referensi.
- Bila nilai $RPs < 1$ dan negatif (-), artinya pertumbuhan sektor tertentu pada tingkat wilayah studi lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan sektor wilayah referensi.

Typology Klassen

Teknik ini dipakai untuk membandingkan tingkat dan laju pertumbuhan pendapatan kabupaten tertentu dengan tingkat dan laju pertumbuhan pendapatan Provinsi. Karenanya typology Klassen menganalisis pola pertumbuhan ekonomi, yang dikelompokkan menjadi 4 tipe yaitu Tipe I daerah makmur, Tipe II daerah tertinggal dalam proses membangun, Tipe III daerah makmur yang sedang menurun (potensi untuk tertinggal), dan Tipe IV daerah tertinggal, seperti nampak pada tabel berikut (Arsyad, 2010);

Tabel 1. Typology Klassen Dengan 4 Type Pembangunan Daerah

Tingkat pertumbuhan pendapatan Kabupaten dibandingkan tingkat pertumbuhan pendapatan Provinsi	Tingkat pendapatan Kabupaten dibandingkan tingkat pendapatan Provinsi	
	Tinggi (>1)	Rendah (<1)
Tinggi (>1)	Tipe I : Daerah makmur	Tipe II: Daerah tertinggal dalam proses membangun
Rendah (<1)	Tipe III: Daerah makmur sedang menurun (potensial untuk tertinggal)	Tipe IV: Daerah tertinggal

Analisis Peluang/Kesempatan Kerja

Analisis ini menggunakan Rasio Penduduk Pengerjaan (RPP), untuk mengetahui kemampuan setiap sektor dalam perekonomian dalam menciptakan peluang/kesempatan kerja. Rumus yang digunakan untuk perhitungan ini adalah sebagai berikut (Arsyad, 2010):

Rasio Penduduk-Pengerjaan = $\frac{\text{Jumlah penduduk suatu daerah}}{\text{Jumlah pekerja secara sektoral}}$

4. HASIL PENELITIAN

Barometer untuk melihat tingkat perkembangan ekonomi dan sektor potensial suatu daerah tentu dengan mencermati pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan potensi-potensi ekonomi yang dimiliki daerah tersebut. Pertumbuhan PDRB yang terus membaik dibarengi dengan keberadaan potensi-potensi ekonomi suatu daerah, muaranya tentu akan mampu mendorong penciptaan lapangan kerja baru.

Oleh karena itu menjadi sangat urgen untuk mengidentifikasi berbagai sektor yang memiliki potensi dan keunggulan yang ada disuatu daerah sebagai penentu penggerak ekonominya. Untuk mendapatkan gambaran tersebut, beberapa model analisis untuk mengidentifikasi potensi-potensi ekonomi yang memiliki peluang sebagai penentu pertumbuhan ekonomi antaranya sebagai berikut.

Analisis Location Quotient (LQ)

Analisis ini menggambarkan suatu sektor, apakah termasuk dalam sektor basis (mampu memenuhi kebutuhan sendiri serta berkontribusi pada daerah lain) atau non-basis dalam perekonomian. Mengacu pada variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lombok Barat dan dibandingkan dengan PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat, akan diperoleh klasifikasi posisi tersebut, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. Hasil Perhitungan Sektor Basis Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017-2021

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021	Rata ²	Tanda
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.9299	0.8905	0.8882	0.9622	0.9507	0.9243	(-) NB
2	Pertambangan dan Penggalian	0.3268	0.4679	0.4963	0.3969	0.3995	0.4175	(-) NB
3	Industri Pengolahan	1.1285	1.0325	1.0419	1.1300	1.1177	1.0901	(+) B
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1.2499	1.1847	1.1733	1.2289	1.2047	1.2083	(+) B
5	Pengadaan Air & Pengelolaan Sampah	1.4213	1.3920	1.4081	1.5259	1.5056	1.4506	(+) B
6	Konstruksi	1.4528	1.3248	1.2822	1.2716	1.2280	1.3119	(+) B
7	Perdagangan Besar dan Eceran	1.0141	0.9195	0.9277	0.9757	0.9620	0.9598	(-) NB
8	Transportasi dan Pergudangan	1.4677	1.4345	1.4307	1.8660	2.0091	1.6416	(+) B
9	Penyediaan Akomodasi Makan Minum	3.8513	3.4684	3.3870	3.2204	3.1881	3.4230	(+) B
10	Informasi dan Komunikasi	1.1259	1.0681	1.0684	1.1247	1.1127	1.1000	(+) B

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021	Rata ²	Tanda
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.9478	0.8857	0.8877	1.0001	1.0066	0.9456	(-) NB
12	Real Estate	1.2451	1.0318	1.0320	1.0969	1.0863	1.0984	(+) B
13	Jasa Perusahaan	0.6910	0.5514	0.5448	0.5372	0.5316	0.5712	(-) NB
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	1.1633	1.0688	1.0504	1.0774	1.0786	1.0877	(+) B
15	Jasa Pendidikan	1.1985	1.0543	1.0375	1.1037	1.0896	1.0967	(+) B
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.0974	0.9640	0.9641	1.0661	1.0555	1.0294	(+) B
17	Jasa Lainnya	1.2877	1.0356	1.0146	1.0574	1.0445	1.0880	(+) B

Sumber: Data primer diolah.

Keterangan: B = sektor basis; NB = sektor non-basis

Secara umum berdasarkan hasil perhitungan dalam tabel diatas terlihat bahwa 12 sektor dari 17 sektor ekonomi (70,59%) Kabupaten Lombok Barat sudah masuk dalam kategori sektor basis. Ke-12 sektor tersebut antaranya adalah sektor Industri Pengolahan; Pengadaan Air & Pengelolaan Sampah; Pengadaan Listrik dan Gas; Konstruksi; Transportasi dan Pergudangan; Informasi dan Komunikasi, Real Estate, Jasa Pendidikan dll. Sedangkan 5 sektor lainnya tidak termasuk dalam sektor basis seperti sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Perdagangan Besar dan Eceran; Jasa Keuangan dan Asuransi serta Jasa Perusahaan.

Dengan gambaran tersebut dapat dijelaskan bahwa produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor-sektor basis tersebut mampu men-support wilayah sendiri (Lombok Barat) untuk memenuhi kebutuhannya, disamping memiliki kontribusi untuk mendukung daerah lainnya termasuk Propinsi NTB. Hal ini perlu menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerahnya, sehingga kedepan sektor basis ini akan menjadi rujukan dan perhatian dalam menentukan sektor prioritas untuk dikembangkan, mengingat *multiplier effect* yang diciptakannya. Meskipun demikian sektor-sektor lainnya yang non basis, tetap harus mendapatkan perhatian pula untuk

ditumbuh-kembangkan sehingga menjadi sektor basis pada masa berikutnya.

Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

Analisis MRP ini pada dasarnya untuk melihat sektor ekonomi yang memiliki potensi berdasarkan kriteria pertumbuhan struktur ekonomi disebuah wilayah. Oleh karena itu acuannya adalah pada dua model rasio pertumbuhan yaitu Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi (RPr) yaitu wilayah diatasnya, dalam hal ini Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RPs), yaitu daerah Kabupaten Lombok Barat itu sendiri. Dengan dasar tersebut maka dapat diklasifikasikan pertumbuhan daerah seperti berikut ini:

Klasifikasi I: Jika sektor tersebut memiliki nilai RPr dan RPs positif (+) berarti kegiatannya pada tingkat provinsi maupun kabupaten mempunyai pertumbuhan yang menonjol, dan hal ini disebut *dominan pertumbuhan*.

Klasifikasi II: Selanjutnya jika nilainya bervariasi, dimana RPr positif (+) dan RPs negatif (-) memberi makna bahwa kegiatan tersebut pada tingkat provinsi mempunyai pertumbuhan menonjol, tapi di tingkat kabupaten belum menonjol.

Klasifikasi III: Sebaliknya kalau nilai RPr negatif (-) sedangkan RPs positif (+) berarti

kegiatan tersebut pada tingkat provinsi mempunyai pertumbuhan tidak menonjol namun ditingkat kabupaten termasuk menonjol.

Klasifikasi IV: Terakhir, jika sektor dengan nilai RP_r dan RP_s negatif (-), menunjukkan kegiatan tersebut pada tingkat provinsi

maupun kabupaten mempunyai pertumbuhan yang rendah.

Berdasarkan klasifikasi diatas, dari hasil perhitungan model rasio pertumbuhan posisi ke 17 sektor ekonomi Kabupaten Lombok Barat, terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 3. Hasil Perhitungan Model Ratio Pertumbuhan Lombok Barat Persektor Ekonomi

No	Sektor Ekonomi	2018/2019		2019/2020		2020/2021		Rata-Rata		Tanda	
		RPr	RP _s	RPr	RP _s	RPr	RP _s	RPr	RP _s	RPr	RP _s
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.3533	0.2747	0.6661	-0.1309	0.4958	0.2960	0.5051	0.1466	(+)	(+)
2	Pertambangan dan Penggalian	0.0472	1.6181	-44.4905	0.6406	-0.0666	0.4624	-14.8366	0.9070	(-)	(+)
3	Industri Pengolahan	1.0448	1.2910	3.8726	0.1398	0.9112	0.6101	1.9429	0.6803	(+)	(+)
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2.8243	2.5743	-14.2681	-0.9480	3.3565	1.9833	-2.6958	1.2032	(-)	(+)
5	Pengadaan Air dan Pengelolaan Sampah	0.9336	1.2446	-6.7353	-0.7988	0.2140	0.0631	-1.8626	0.1697	(-)	(+)
6	Konstruksi	3.1324	2.2237	22.9443	2.9085	3.8814	1.8613	9.9861	2.3312	(+)	(+)
7	Perdagangan Besar dan Eceran	1.6339	1.8873	8.0069	0.9242	0.7489	0.4020	3.4632	1.0712	(+)	(+)
8	Transportasi dan Pergudangan	0.3431	0.2625	50.4440	2.3104	0.9303	3.2832	17.2392	1.9520	(+)	(+)
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan	-0.0079	-0.6339	45.4209	5.1425	0.5875	0.4154	15.3335	1.6413	(+)	(+)
10	Informasi dan Komunikasi	1.0555	1.0632	-19.9092	-1.5164	2.1608	1.4620	-5.5643	0.3362	(-)	(+)
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.3588	0.4077	-17.8825	-2.4333	1.9045	1.8200	-5.2064	-0.0685	(-)	(-)
12	Real Estate	1.2208	1.2294	-1.6707	-0.0661	0.6403	0.4606	0.0635	0.5413	(+)	(+)
13	Jasa Perusahaan	1.2848	0.9640	5.5381	1.5551	0.1451	0.1054	2.3226	0.8748	(+)	(+)
14	Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan	0.9315	0.4664	-4.6944	0.1775	0.7563	0.8670	-1.0022	0.5036	(-)	(+)
15	Jasa Pendidikan	1.8055	1.3723	-1.3123	-0.0467	0.7239	0.4249	0.4057	0.5835	(+)	(+)
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.5658	1.5759	3.8317	-0.1396	3.4160	2.3354	2.9378	1.2573	(+)	(+)
17	Jasa Lainnya	1.4033	0.8512	9.9689	1.2144	0.7160	0.4344	4.0294	0.8333	(+)	(+)

Sumber: Data Sekunder Diolah

Dengan hasil seperti dalam tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa terdapat 6 sektor (35,29%) dari 17 sektor ekonomi yang memiliki nilai lebih besar dari 1 dan positif. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor-sektor tersebut sangat baik di Lombok Barat, meskipun wilayah referensi yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat juga memiliki nilai yang lebih besar dari 1. Ini menggambarkan bahwa sektor tersebut tumbuh secara simultan dan saling mendukung dikedua daerah (daerah studi dan

referensi). Ke enam sektor tersebut diantaranya adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Konstruksi, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Perdagangan Besar dan Eceran, Transportasi dan Pergudangan, dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Sedangkan sisanya masih terdapat 6 sektor yang bernilai positif meskipun kurang dari 1, namun nilainya lebih tinggi dari nilai wilayah referensi. Ini mencerminkan sektor-sektor ini memiliki peluang dan potensi untuk tumbuh lebih baik kedepan, seperti sektor

Pertambangan dan Penggalian, Pengadaan Air dan Pengelolaan Sampah, Informasi dan Komunikasi, Real Estate, Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib serta Jasa Pendidikan.

Dengan hasil diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Lombok Barat, disamping sebagai penyangga ibu kota propinsi juga sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pembangunan, terutama bidang pariwisata. Sehingga perkembangan basis ekonomi lebih mengarah pada bidang industri, jasa pendidikan, transportasi, dan telekomunikasi. Dan semakin maju suatu wilayah, maka kebutuhan-kebutuhan akan hal tersebut semakin besar diperlukan masyarakatnya.

Sebaliknya sektor-sektor seperti sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, jasa perusahaan dan jasa lainnya, dalam analisis ini menunjukkan perkembangan yang lebih lambat jika dibandingkan dengan wilayah referensi. Ini tentunya terkait dengan kondisi secara umum, dimana sektor pertanian makin

menurun kontribusinya dalam perekonomian global. Demikian pula dengan sektor jasa-jasa, seperti diketahui Kabupaten Lombok Barat sebagai penyangga ibu kota propinsi (Mataram), dan relative dekat jarak ibu kota keduanya, tentu kegiatan bidang jasa-jasa ini (para pelaku usaha) lebih memilih kota Mataram sebagai basis tempat kegiatannya, karena disamping akses yang mudah dalam berkegiatan juga jangkauan dalam pemasarannya yang lebih luas.

Analisis Typology Klassen

Analisis ini menggambarkan tentang tingkat dan laju pertumbuhan pendapatan Kabupaten Lombok Barat dengan tingkat dan laju pertumbuhan pendapatan Provinsi NTB. Dengan kata lain menggambarkan pola pertumbuhan ekonomi antar kedua wilayah. Berdasarkan nilai variabel laju pertumbuhan PDRB dan nilai pendapatan perkapita Kabupaten Lombok Barat dan Nusa Tenggara Barat diperoleh hasil seperti dalam tabel berikut.

Tabel 4. Tipologi Klassen Kabupaten Lombok Barat 2017–2021.

Tahun	Laju Pertumbuhan (%)		Katagori	PDRB Perkapita (Juta)		Katagori
	Lombok Barat	NTB		Lombok Barat	NTB	
2017	6.54	0,09	Tinggi (+)	15.450	19.090	Rendah (-)
2018	0.57	-4,50	Tinggi (+)	15.313	18.020	Rendah (-)
2019	3.84	3,90	Rendah (-)	15.425	18.513	Rendah (-)
2020	-7.08	-0,62	Rendah (-)	14.082	17.535	Rendah (-)
2021	3,40	2,30	Tinggi (+)	14.310	17.517	Rendah (-)
Rata-rata	0.77	0.23	Tinggi (+)	14.916	18.135	Rendah (-)

Sumber: Data sekunder diolah.

Dari hasil perhitungan seperti dalam tabel diatas, ternyata laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Barat cukup bervariasi/fluktuatif selama 5 tahun analisis. Diawali tahun 2017 dengan nilai positif cukup tinggi diangka 6,54%, kemudian turun tajam ditahun 2018 dibawah 1%. Hal ini terjadi karena efek gempa bumi yang sangat dahsyat melanda Lombok yang berdampak pula pada

kegiatan ekonomi masyarakat. Namun di tahun 2019 keadaan sudah mulai membaik yang ditandai dengan pertumbuhan yang meningkat menjadi 3,84%. Hanya saja keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan, karena di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Lombok Barat terjun bebas mencapai -7,08%. Kondisi ini tidak mengherankan karena pada kurun waktu 2020- 2021, wabah virus covid-

19 sedang melanda dunia yang berdampak pada merosotnya perekonomian masyarakat. Karena itu secara rata-rata pertumbuhan ekonomi Lombok Barat selama 5 tahun analisis masih positif 0,77%, meskipun dalam suasana prihatin.

Kondisi yang tidak jauh beda terlihat di level NTB yang perubahannya juga tidak terjadi secara drastis, namun tetap fluktuatif (plus minus). Dimulai tahun 2017 dengan nilai 0,09%, turun menjadi -4,50% pada 2018. Namun di tahun 2019 naik lagi menjadi 3,90%, dan karena efek covid-19, maka tahun 2020 mengalami pertumbuhan negative lagi. Meskipun demikian secara rata-rata selama 5 tahun, nilai pertumbuhan ekonomi NTB masih positif diangka 0,23% dan nilai tersebut dibawah rata-rata nilai pertumbuhan Kabupaten Lombok Barat.

Dari aspek pendapatan perkapita juga mencerminkan kondisi yang relatif sama polanya dengan pertumbuhan ekonomi. Selama 5 tahun pengamatan, pendapatan perkapita Kabupaten Lombok Barat rata-rata lebih rendah dengan pendapatan perkapita Propinsi NTB. Kisaran pendapatan perkapita Kabupaten Lombok Barat berada pada angka Rp14.916.000,- Sedangkan untuk Propinsi

NTB kisarannya antara Rp17.517.000,- sampai dengan Rp18.513.000,- dengan rata-rata Rp18.135.000,-

Dengan demikian mengacu pada Tipology Klassen, maka Kabupaten Lombok Barat selama tahun pengamatan (2017-2021) jika dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya masuk dalam katagori tinggi (+) dibandingkan daerah NTB. Artinya selama waktu tersebut laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Barat lebih baik dari daerah NTB. Namun sebaliknya dari sisi pendapatan perkapita, Kabupaten Lombok Barat memiliki tingkat pendapatan perkapita relatif lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan perkapita Propinsi NTB. Dengan hasil tersebut, maka Kabupaten Lombok Barat dari aspek pertumbuhan ekonominya tergolong dalam katagori tinggi (+), sedangkan dari sisi pendapatan perkapita termasuk dalam katagori rendah (-). Oleh karena itu, dengan hasil perhitungan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, kondisi perekonomian Lombok Barat termasuk dalam tipe II, yaitu daerah *Tertinggal dan Dalam Proses Membangun*, sebagaimana dapat dilihat pada matrik berikut.

Tabel 5. Klasifikasi Pola Pertumbuhan Ekonomi Lombok Barat Berdasar Tipology Klassen

Tingkat pertumbuhan pendapatan Kabupaten/Kota dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan pendapatan Provinsi	Tingkat pendapatan Kabupaten/Kota dibandingkan dengan tingkat pendapatan Provinsi.	
	Tinggi (>1)	Rendah (<1)
Tinggi (>1)	Tipe I Daerah makmur.	Tipe II (Kabupaten Lombok Barat) Daerah tertinggal & dalam proses membangun
Rendah (<1)	Tipe III Daerah makmur yang sedang menurun (potensial untuk tertinggal)	Tipe IV Daerah tertinggal

Sumber: Data sekunder diolah

Dari matrik diatas terlihat bahwa Kabupaten Lombok Barat dalam rentang waktu 2017-2021 masih merupakan daerah

dengan pola pertumbuhan ekonomi yang cenderung berkembang. Hal ini merujuk pada pola perekonomiannya selama 5 tahun

pengamatan. Kalau dilihat secara partial, perkembangan tahunannya memang fluktuatif. Keadaan ini tentu tidak lepas dari masalah perekonomian regional maupun global yang melanda selama pengamatan. Demikian juga dengan pertumbuhan pendapatan perkapitanya mengalami pasang surut. Selama periode 2017-2019 terjadi kenaikan, namun di tahun 2020 turun lagi dan di periode berikutnya secara bertahap mengalami kenaikan. Hanya saja yang menjadi catatan disini adalah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Barat secara rata-rata lebih baik dan dinamis dibandingkan dengan Propinsi NTB.

Dengan gambaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Barat relatif lebih baik jika dibandingkan dengan Propinsi NTB. Hal ini tentu disebabkan karena sektor-sektor pendukung pertumbuhannya seperti sektor jasa, industri pengolahan, real estate, pariwisata dan lainnya cukup stabil dan makin berkembang. Kondisi ini tidak lepas dari ciri-ciri ekonomi daerah penyangga ibukota propinsi (Mataram) pada umumnya, dimana

pendukung utama pertumbuhannya adalah sektor tertier dan sekunder.

Analisis Peluang/Kesempatan Kerja

Apabila mengacu pada analisis diatas tentang potensi beberapa sektor ekonomi yang ada di Lombok Barat, ternyata dalam menciptakan peluang kerja setiap sektor potensial tersebut memiliki kemampuan yang berbeda. Dengan pendekatan rumus Rasio Penduduk Pengerjaan (RPP), dapat dijelaskan bahwa dari 17 sektor ekonomi yang ada, setiap sektor memiliki peluang dan kemampuan serapan tenaga kerja yang berbeda. Berdasarkan hasil analisis, peluang kesempatan kerja pada sektor ekonomi Lombok Barat, didominasi (90,06%) oleh 5 sektor utama. Kelima sektor tersebut adalah Pertanian, kehutanan, dan perikanan, Industri pengolahan, Perdagangan besar dan eceran, Transportasi dan pergudangan serta Jasa keuangan dan asuransi perusahaan, dan sosial. Sedangkan sektor lain diluar sektor tersebut, relative masih kecil kontribusinya dalam penciptaan kesempatan kerja, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 6. Persentase Kesempatan Kerja Berdasar Lapangan Usaha di Kabupaten Lombok Barat

No	Kesempatan kerja sesuai Lapangan Usaha	2018	2019	2020	Rata ²
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22.1	22.11	22.45	22.22
2	Industri Pengolahan	12.9	16.11	13.55	14.19
3	Perdagangan Besar dan Eceran	29.4	10.16	17.41	18.99
4	Transportasi dan Pergudangan	3.9	22.56	15.69	14.05
5	Jasa Keuangan dan Asuransi, Perusahaan, dan sosial	17.3	22.54	22.0	20.61
6	Sektor lainnya				9,94

Sumber : Data primer diolah.

Atas dasar data tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebenarnya bukan termasuk sektor basis di Lombok Barat, karena memang kontribusinya terhadap PDRB terus menurun tiap tahun. Demikian juga nilai ratio pertumbuhannya (MRP) relative kecil dibawah propinsi NTB sehingga

termasuk tidak menonjol. Namun karena untuk bekerja di sektor ini tidak memerlukan keterampilan dan persyaratan khusus, maka sangat mudah untuk menampung tenaga kerja yang berlebihan dimasyarakat.

Sedangkan sektor Jasa-jasa, Perdagangan Besar dan Eceran, Transportasi dan Pergudangan serta Industri Pengolahan adalah

4 sektor ekonomi Lombok Barat yang belakangan ini terus tumbuh dengan baik. Hal ini terlihat dari 3 diantaranya sudah termasuk dalam sektor basis. Demikian juga ratio pertumbuhannya sudah positif yang mencerminkan bahwa sektor tersebut termasuk dalam kategori sektor ekonomi yang menojol di Lombok Barat. Kondisi yang baik ini tidak lepas dari pertumbuhan pariwisata daerah yang terus berkembang, yang mendorong sektor-sektor tertier seperti jasa terus tumbuh dengan pesat. Disamping juga posisi strategis Kabupaten Lombok Barat sebagai wilayah penyangga ibu kota Propinsi Nusa Tenggara Barat, Mataram.

5. KESIMPULAN

Dari hasil analisis Location Quotient (LQ) dan Model Rasio Pertumbuhan (MRP), sektor ekonomi yang memiliki potensi baik untuk tumbuh dan berkembang di Lombok Barat antara lain sektor penyediaan akomodasi makan minum, Industri Pengolahan, Pengadaan Air & Pengelolaan Sampah, Konstruksi, Jasa Pendidikan dan jasa lainnya, Perdagangan Besar dan Eceran, serta sektor Transportasi dan Pergudangan. Potensi tersebut terlihat dari posisi sektor-sektor dimaksud sebagai sektor basis, disamping juga nilai ratio pertumbuhannya yang positif dan lebih besar dari 1. Oleh karena itu ke-7 sektor diatas akan menjadi sektor andalan untuk perekonomian Lombok Barat kedepan. Selanjutnya mengacu pada pola pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita selama periode 2017–2021, dengan tipologi Klassen termasuk dalam klasifikasi Tipe II yaitu ‘*daerah tertinggal dan dalam proses membangun*’. Hasil ini tentu selaras dengan pola pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Barat yang relatif lebih rendah dan dalam proses pengembangan jika dibandingkan dengan Propinsi NTB. Keadaan ini berkaitan juga dengan sektor pendukung pertumbuhannya yang masih didominasi oleh

sektor sekunder dan mulai mengarah ke sektor tersier, seperti sektor jasa, penyediaan akomodasi makan minum, transportasi dan pergudangan, industri pengolahan, real estate, dan lainnya. Sedangkan dari sisi peluang/kesempatan kerja, saat ini masih didominasi oleh 5 sektor ekonomi utama yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, Transportasi dan Pergudangan serta Jasa Keuangan dan Asuransi, Perusahaan, dan sosial. Untuk sektor lain diluar yang lima sektor tersebut, relative masih kecil kontribusinya dalam penciptaan kesempatan kerja.

Dengan posisi Kabupaten Lombok Barat sebagai *daerah tertinggal dan dalam proses membangun*, maka menjadi tugas cukup berat bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan statusnya menjadi daerah makmur. Upaya yang bisa dilakukan antara lain pemetaan potensi ekonomi yang selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat dan dunia usaha, yang membuka peluang untuk investasi. Selanjutnya lebih aktif melakukan kegiatan promosi secara periodik terhadap hasil produksi/industri dan jasa-jasa melalui pameran-pameran dagang baik di tingkat lokal maupun nasional/internasional, serta membangun suasana nyaman dan aman di daerah, yang menciptakan ketenangan bagi para investor dalam berkiprah membangun dan mengembangkan bisnisnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2002. Metodologi Penelitian. Penerbit PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Arsyad, L. 2010. Ekonomi Pembangunan. Edisi ke Lima. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- _____. 2011. Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah. Cetakan Keempat. BPFE, Yogyakarta.
- Aziz, I. J., 1994, “Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia”, FEUI, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Lombok barat, 2021, “Lombok Barat Dalam Angka 2015/2020”, Katalog BPS. 1403.5202.
- _____, 2021, “Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lombok Barat”, Gerung.
- _____, 2021, “Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Nusa Tenggara Barat”, Mataram.
- Imelia, E., 2006. “Modul Ekonomi Regional”. Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Jambi, Jambi.
- Irawan, M. S., 2012, “Ekonomika Pembangunan”, Edisi Keenam, BPFE. Yogyakarta.
- Marhamah. 2000. “Pertumbuhan Ekonomi dan Identifikasi Sektor Unggulan Provinsi Sumatra Utara Periode 1993-1997”. Tesis.: Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Nazir, M., 2009, “Metode Penelitian”, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sudantoko. H. D, 2003, “Dilema Otonomi Daerah”, ANDI, Yogyakarta:
- Sukirno, S. 2013. “Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan”, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Suryana, 2000. “Ekonomi pembangunan: Problematika dan Pendekatan”. Salemba Empat. Jakarta,
- Tarigan, R. 2005. “Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi”, Bumi Aksara. Jakarta,
- _____. 2014. “Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi, Edisi Revisi”, Bumi Aksara. Jakarta,
- Todaro, M, P. 2010. “Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga”, Edisi kedelapan, Erlangga, Jakarta.
- McEacheen, W. A. 2000. “Ekonomi Makro: Pendekatan Kontemporer”, Salemba Empat, Jakarta.

Sumber on-line:

<https://petatematikindo.wordpress.com>.
[Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat \(bps.go.id\)](https://bps.go.id)
[Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat \(bps.go.id\)](https://bps.go.id)